

RESENSI BUKU

Judul	: Mengobarkan Kembali Api Pancasila
Penulis	: Sayidiman Suryohadiprojo
Tebal Buku	: viii + 280 halaman
Edisi	: 2014
Penerbit	: Penerbit Buku Kompas

Buku dengan judul *Mengobarkan Kembali Api Pancasila* yang merupakan kumpulan tulisan di harian *Kompas* ini ditulis seorang negarawan Sayidiman Suryohadiprojo. Penulis mengungkapkan keprihatinannya terhadap bangsa Indonesia yang dipandang semakin menjauh dari cita-cita kemerdekaan dan tentang pentingnya menjadikan Pancasila sebagai kenyataan dalam kehidupan berbangsa. Buku yang diterbitkan beberapa bulan sebelum pelaksanaan pemilihan umum 2014 ini diharapkan dapat dibaca para calon pemimpin dan elit politik pada rezim berikutnya karena berisi pesan-pesan substansial mengenai kondisi terkini bangsa. Selain itu, buku ini berisi pentingnya merefleksikan kembali tujuan negara agar sesuai dengan pandangan dan dasar negara Pancasila.

Bangsa Indonesia, saat ini, dilingkupi oleh berbagai persoalan yang semakin menjauhkan dari cita-cita para pendiri bangsa dan pembentukan negara merdeka. Satu-satunya jalan untuk keluar dari hal tersebut dan mempercepat terwujudnya cita-cita kemerdekaan Indonesia adalah mengobarkan kembali semangat Pancasila dan menjadikannya sebagai sebuah kenyataan.

Buku yang dibagi menjadi lima bab ini secara komprehensif membahas berbagai refleksi semangat Pancasila dalam kehidupan saat ini. Dimulai dari pentingnya meletakkan Pancasila sebagai pandangan hidup dalam berbangsa dan meluruskan pijakan awal masyarakat dalam mewujudkan cita-cita pembentukan negara. Selanjutnya, dibahas hakikat demokrasi Indonesia yang sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila, baik dalam

aspek politik, ekonomi, maupun sosial. Bagian terakhir, dalam upaya untuk menjadikan Pancasila sebagai kenyataan, diperlukan peran pemimpin yang mempunyai jiwa nasionalisme dan patriotisme yang kuat, mempunyai visi, serta manajemen nasional, serta terus-menerus berupaya mewujudkan tujuan bersama bangsa.

Buku yang sebenarnya sangat filosofis ini sangat menarik untuk dibaca karena disajikan dalam bahasa yang lugas walaupun di sana sini terdapat kesalahan gramatikal dan pengulangan pesan. Hal ini bisa jadi karena penyusunan buku ini diambil dari beberapa artikel lepas yang pernah ditulis. Namun, buku ini sangat baik apabila dapat dibaca oleh para penyelenggara negara, elit politik, para wakil rakyat, maupun masyarakat madani. Tulisan dalam buku ini menggugah dan memberikan kesadaran pentingnya kembali kepada Pancasila jika kita ingin menjadikan Indonesia yang maju, sejahtera, dan berkeadilan, serta sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia.

Mengawali tulisan ini, penulis mengajak pemahaman kita harus menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara. Banyak contoh negara maju dan sejahtera merupakan negara-negara yang menggunakan prinsip-prinsip barat. Namun, kondisi seperti itu belum tentu cocok bila diterapkan di Indonesia karena tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa. Kenyataannya saat ini telah terjadi penyimpangan perilaku yang sangat parah dari bangsa yang berlandaskan Pancasila ini. Pandangan hidup barat sejak terjadinya *Renaissance* di Eropa pada abad ke-16 sangat mengutamakan cara berpikir rasional. Menurut ajaran ini, manusia

dilahirkan bebas dan sama (*free & equal*). Manusia bebas adalah individu otonom yang mengejar kepentingannya masing-masing. Siapa pun yang tidak tercapai keinginannya, hal itu merupakan kesalahannya sendiri karena tidak mampu menggunakan kemampuan dan kebebasannya yang mutlak. Dikatakan bahwa pikiran barat mengutamakan individualisme dan liberalisme.

Ketika setiap individu mengejar kepentingannya sendiri, di situlah terjadi persaingan bahkan konflik. Perdamaian hanya dapat terjadi melalui kekuasaan dan kontrak damai. Akhirnya, manusia selalu berorientasi pada kekuasaan. Hanya dengan kekuasaanlah kepentingan manusia dapat dijamin sepenuhnya dan dapat dipaksakan kepada pihak lain. Apabila diperlukan kebersamaan, hal itu bukan didorong untuk mencapai harmoni antar-manusia, melainkan karena didorong pikiran rasional bahwa tanpa itu akan timbul konflik yang dapat merugikan kepentingan. Jadi, kehidupan barat sebenarnya selalu diliputi suasana konflik berlanjut (*eternal conflict*). Hal inilah yang akhirnya mendorong Montesquieu dalam urusan kenegaraan menggagas pembagian kekuasaan menjadi tiga bagian atau *Trias Politica* untuk keseimbangan dan saling kontrol.

Pikiran barat menganut suatu kesalahan mendasar bahwa semua manusia dianggap sama. Dalam kenyataan, semua itu tentu tidak benar. Setiap manusia berbeda, ada yang kuat dan lemah, ada yang cerdas dan kurang cerdas. Karena manusia dinyatakan mempunyai kebebasan yang mutlak, sering diungkapkan bahwa mereka yang kuat menguasai yang lemah. Hal ini menyebabkan, mereka yang kuat bahkan dianjurkan untuk serakah dalam mengejar kepentingannya. Prinsip-prinsip materialisme yang kuat ini juga mendorong lahirnya kapitalisme dan di tingkat yang lebih luas menghalalkan terjadinya imperialisme dan kolonialisme.

Pandangan hidup seperti ini sebenarnya telah sering mendapatkan kritikan bahkan dari orang barat sendiri. Prinsip seperti ini pada akhirnya akan menghancurkan bangsa barat itu sendiri, seperti akibat yang ditimbulkan Perang Dunia I dan II. Selain itu, sering terjadi krisis ekonomi dengan menggunakan prinsip-prinsip

individualisme liberalisme, bahkan neoliberalisme. Pancasila sebagai nilai luhur bangsa Indonesia sebaliknya berlawanan dengan pandangan barat. Ketika para penggali Pancasila menjadikannya sebagai falsafah dan pandangan hidup bangsa, sekaligus menjadi dasar negara merdeka, Indonesia, mereka telah memikirkan secara mendalam peran dan fungsi Pancasila dapat menjadi pedoman dalam mencapai tujuan dan cita-cita negara merdeka. Suatu negara akan kuat apabila dilandasi oleh jiwa bangsa yang merupakan jati dirinya. Dengan Pancasila sebagai pandangan hidup, Indonesia pasti dapat mencapai keunggulan seperti yang dicapai dunia barat. Banyak contoh negara yang mencapai kemajuan dan bahkan unggul dari negara-negara barat karena berpegang teguh kepada nilai-nilai luhur bangsanya, seperti Jepang dan Korea.

Cara berpikir Pancasila berbeda dari cara berpikir barat. Manusia Indonesia adalah manusia ciptaan Tuhan yang berbeda satu sama lain. Manusia Indonesia adalah manusia yang menyadari bahwa Tuhan adalah sumber kehidupan, setiap individu adalah bagian dari masyarakat, dan hidup dalam kesatuan dengan manusia lainnya. Dalam kaitan ini, moral dan etika merupakan hal penting dalam perilaku manusia. Pancasila menolak individualisme, liberalisme, dan materialisme barat yang tidak mengakui Tuhan. Dengan alasan yang sama bangsa Indonesia juga harusnya menolak kapitalisme-liberalisme dan neoliberalisme. Orang yang kuat dan kaya modal dapat berlaku semaunya bahkan menindas yang lemah. Imperialisme dan kolonialisme dapat menyengsarakan. Berbanding terbalik dengan nilai Pancasila yang mengedepankan gotongroyong. Kehidupan bangsa berdasarkan Pancasila selalu bersifat kekeluargaan dan kebersamaan. Itulah kehidupan sosial Pancasila.

Dalam bidang politik seperti yang dikatakan Ki Hadjar Dewantara, demokrasi Indonesia menggunakan prinsip dasar 'perbedaan dalam kesatuan, kesatuan dalam perbedaan'.

Selama perjalanan bangsa Indonesia, praktik-praktik ketatanegaraan banyak yang melenceng jauh dari pedoman nilai-nilai Pancasila. Seluruh aspek kehidupan: politik, ekonomi, kebudayaan, dan sosial tidak lagi

dilakukan sesuai dengan ruh Pancasila. Sejak diberlakukan pembangunan ekonomi, dari tahun 1966 sampai sekarang, implementasi paham ekonomi kapitalisme-liberalisme mendominasi. Perekonomian tidak lagi disusun sebagai usaha bersama seperti yang diamanatkan oleh konstitusi. Dalam bidang politik, selama orde parlementer prosedur politik yang diterapkan menggunakan konsep barat individualisme-liberalisme. Penerapan konsep ini telah terbukti menimbulkan kegaduhan politik, sering terjadi hancurnya kabinet pemerintahan, dan tidak efektifnya pemerintahan. Selama Orde Baru, tatanan kenegaraan Indonesia telah cenderung menjadi otoriter dan sudah sangat jauh dari prinsip demokrasi Pancasila. Ketika memasuki era reformasi, dengan semangat untuk mengadakan perubahan dari era yang otoritarian, Indonesia telah melakukan amandemen konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945, sebanyak empat kali. Namun, perubahan konstitusi justru telah ‘memerkosa’ bentuk demokrasi *ala* Pancasila.

Penerapan konsep politik, ekonomi, dan sosial barat selama perjalanan kehidupan ketatanegaraan Indonesia telah banyak menimbulkan efek yang kurang baik terhadap bangsa. Dalam bidang ekonomi, penerapan konsep ekonomi kapitalisme-liberalisme belum dapat mengantarkan Indonesia pada kemajuan dan pemerataan kesejahteraan. Pertumbuhan ekonomi yang dicapai tidak serta-merta meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat, tetapi sebaliknya meningkatkan persentase rakyat miskin atau berada di bawah garis kemiskinan. Kesenjangan antara pihak kaya dan miskin semakin lebar. Dalam bidang politik dan sosial telah terjadi banyak kekacauan dan krisis multidimensional. Hal itu tentu saja menjauhkan Indonesia dari upaya meraih tujuan negara. Oleh karena itu, sudah saatnya Indonesia merefleksi perjalanannya, mengkaji ulang konstitusi, serta menyesuaikan dengan jiwa bangsa Indonesia yaitu Pancasila.

Mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 kepada bentuk aslinya adalah pesan paling penting yang disampaikan penulis dalam rangka mengobarkan kembali api

Pancasila dan menjadikannya kenyataan dalam kehidupan berbangsa. Dalam demokrasi politik penjelmaan kekuasaan rakyat harus diwujudkan dalam peran lembaga tertinggi negara, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). MPR harus dapat menjelmakan keterwakilan seluruh rakyat, bukan terbatas pada pemilihan semata. Pemilu memang diperlukan untuk memilih wakil-wakil yang sesuai dan tepat menurut keinginan setiap individu warga. Namun, harus ada pula bagian rakyat yang diangkat untuk mewakili berbagai unsur bangsa; etnik/suku, profesi, agama, kebudayaan, atau berbagai golongan yang benar-benar menjadi penjelmaan rakyat. Dengan komposisi seperti ini, MPR layak kembali menjadi lembaga tertinggi negara. Lembaga inilah yang dengan prinsip musyawarah dan mufakat bertugas membuat Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang merupakan komitmen tertinggi bersama bangsa. GBHN mengandung rencana dan program strategis, terstruktur, dan terintegrasi yang akan direalisasikan di bawah kepemimpinan presiden yang dipilih dan diangkat oleh lembaga jelmaan kedaulatan rakyat MPR.

Perekonomian haruslah disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, bukan dilandasi oleh prinsip individualisme dan kapitalisme. Pemerintah memiliki tanggung jawab khusus untuk menyelenggarakan segala sesuatu yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Banyak cabang produksi penting negara kini dikuasai swasta dan pihak asing. Kondisi yang telah lama berlangsung ini harus dihentikan. Perekonomian Indonesia harus dapat diwujudkan untuk memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kebersamaan membangun usaha yang dikuasai pemerintah, swasta, maupun usaha rakyat dapat memajukan perekonomian, memperkecil jurang perbedaan kaya-miskin, sekaligus meningkatkan kesejahteraan bangsa.

Dalam perjuangan bangsa untuk mewujudkan tujuannya, faktor karakter merupakan syarat yang sangat diperlukan guna

mencapai keberhasilan. Karakter bangsa perlu dibangun sedemikian rupa sehingga dapat menjadi modal sosial dalam menghadapi tantangan dan hambatan. Karakter bangsa tidak saja mencakup semua sifat khas manusia Indonesia, tetapi harus dilengkapi dengan semua sifat positif yang kuat secara mental dan spiritual, tangguh, alot, ulet, gagah perkasa, serta sanggup berprestasi dalam persaingan dengan bangsa lain. Selain itu, semua karakter yang baik tersebut akan bermanfaat jika disertai dengan rasa kecintaan, nasionalisme, dan patriotisme terhadap bangsa.

Pembangunan karakter harus menjadi prioritas tertinggi dalam perjuangan bangsa saat ini dan masa depan. Pembangunan karakter harus menonjol mulai dari pendidikan terendah sampai pendidikan tertinggi, dari keluarga maupun masyarakat. Karakter dibentuk dari pendidikan budi pekerti dan sopan santun. Selain itu, pendidikan karakter diperkaya dengan memompakan semangat kecintaan terhadap bangsa dan menanamkan semangat nasionalisme dan patriotisme.

Peran pemimpin dalam pendidikan karakter bangsa menjadi sangat penting. Pemimpin dari level tertinggi sampai terendah, formal maupun informal, pemimpin keluarga dan masyarakat, memberikan keteladanan dalam rangka membangun karakter bangsa. Dalam hal ini juga diperlukan komitmen yang kuat dan konsisten dari seluruh pemimpin. Di tingkat negara, di bawah kepemimpinan

nasional, pembangunan karakter ini jangan hanya menjadi wacana, tetapi harus benar-benar menjadi gerakan nasional yang harus segera dilakukan.

Peran pemimpin dan manajemen nasional yang tepat dan efektif juga diperlukan untuk meminimalkan seluruh kekurangan, ke-tertinggalan, dan keterpurukan yang mencengkeram bangsa saat ini. Pemimpin yang kuat mengajak, memotivasi, dan menggerakkan manusia Indonesia untuk mau dan rela memberikan yang terbaik bagi bangsanya demi terwujudnya tujuan kemerdekaan. Manajemen nasional yang tepat dan efektif memberdayakan seluruh potensi yang dimiliki bangsa baik berupa sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang diorientasikan untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat.

Buku ini memberikan penyadaran kepada setiap warga negara bahwa kita harus kembali kepada jati diri bangsa Pancasila. Begitu banyak kerawanan dan persoalan yang disebabkan oleh hilangnya kepribadian bangsa sehingga tidak lagi mempunyai orientasi yang jelas untuk mencapai tujuan kemerdekaan yang telah dicapai dengan susah payah oleh para pejuang bangsa. Buku ini menjadi buku yang sangat penting dibaca oleh setiap warga negara yang mempunyai kepedulian terhadap masa depan Indonesia.

Oleh: Prima Roza

GAYA SELINGKUNG DAN TATA LETAK PENULISAN ARTIKEL ILMIAH DI JURNAL SOSIOTEKNOLOGI

JUDUL ARTIKEL (12pt, bold)

Penulis Pertama¹, Penulis Kedua (12pt, bold)

1. Institusi penulis pertama (12pt)
Email: pertama@email1. (12pt)

ABSTRAK (10pt,bold)

Makalah ditik dengan kertas ukuran A4 (210 mm x 297 mm), margin kiri 40 mm dan margin atas, kanan, dan bawah 30 mm dan ditulis dengan huruf *Times New Roman* dengan spasi tunggal dan format satu kolom. Makalah diawali dengan abstrak sepanjang 100-150 kata dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Untuk abstrak berbahasa Inggris ditik miring dengan ukuran huruf 10 poin. Abstrak hendaknya secara jelas memuat latar belakang masalah, tujuan, teori dan metode, temuan atau keponiran gagasan, dan simpulan utama.

Kata kunci: jumlah maksimal lima kata dan dipisahkan dengan koma.

PENDAHULUAN (12pt, bold)

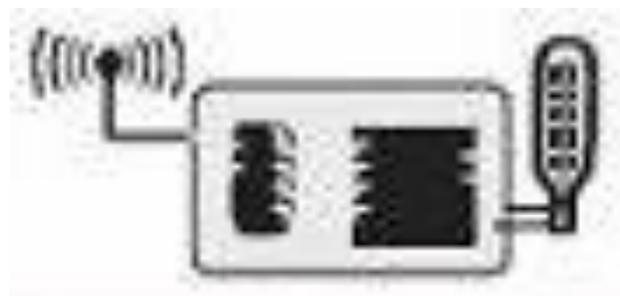
Pendahuluan memuat identifikasi masalah, tinjauan pustaka, tujuan penelitian, serta manfaat hasil riset. Baris kalimat berjarak satu spasi. Huruf yang digunakan adalah *Times New Roman* 12 poin, dengan penulisan rata kanan dan kiri. Format ini juga digunakan di seluruh bagian utama artikel.

Alinea selanjutnya dapat ditambahkan jika diperlukan untuk memberikan penjelasan yang dianggap penting bagi pembaca.

METODE (12pt, bold)

Bagian ini menjelaskan cara penelitian dilakukan serta dilengkapi dengan uraian tentang bahan, peralatan, dan tata laksana yang digunakan dalam melakukan analisis ataupun penelitian. Uraian dapat diperjelas menggunakan gambar, skema, grafik, atau tabel. Setiap gambar dan tabel diberi nomor yang berurutan mulai dari 1, 2, 3 hingga gambar atau tabel terakhir. Keterangan gambar dan tabel didahului dengan kata “Gambar” atau “Tabel” dan ditulis menggunakan huruf *Times New Roman* 10 poin dan rata tengah.

Keterangan gambar diletakkan di bagian bawah gambar, sedangkan keterangan tabel diletakkan di bagian atas tabel. Seluruh gambar dan tabel yang disertakan harus dijelaskan pada bagian tulisan. Contoh penulisan Gambar 1 di bawah ini.



Gambar 1 Sensor node (tanpa titik)

Subbab (12pt, bold)

Apabila diperlukan, dapat diberi penjelasan lanjut mengenai materi yang dibahas.

Subbab (12pt, bold)

Apabila diperlukan, dapat diberi penjelasan lanjut mengenai materi yang dibahas. Contoh penulisan yang mengambil dari referensi misalnya kalimat berikut. Ideologi adalah sisi abstrak dari kebudayaan: *kepercayaan, filsafat, nilai, norma, pengetahuan, sentimen, etika, pandangan dunia (world view), etos, dan mentalitas* (Kaplan, 1972: 112).

HASIL DAN PEMBAHASAN (12pt, bold)

Hasil dan pembahasan memaparkan hasil penelitian ataupun analisis yang diperoleh. Berbagai fakta serta fenomena yang dianggap penting dapat dijabarkan lebih lanjut pada bagian ini. Setelah itu, dilanjutkan dengan pembahasan secara mendalam dengan menyebutkan temuan atau keponiran gagasan beserta signifikansinya. Penulisan tabel dapat mengikuti contoh pada Tabel 1 berikut.

TABEL I NILAI RGB PADA WARNA (tanpa titik)

Warna	RED	GREEN	BLUE
Cyan	0x00	0xFF	0xFF
Magenta	0xFF	0x00	0xFF
Yellow	0xFF	0xFF	0x00

SIMPULAN (12pt, bold)

Bagian ini memuat simpulan yang diperoleh dari hasil penelitian. Dituliskan dalam bentuk ringkasan dan jika diperlukan dapat diberikan nomor urut setiap paragrafnya. Dapat pula ditambahkan beberapa saran untuk pengembangan lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA (12pt, bold)

Daftar pustaka mengacu pada APA Style of citation, lihat www.apastyle.org. Pastikan bahwa setiap referensi yang dikutip di dalam naskah terdapat dalam daftar pustaka dan sebaliknya.

Buku

Chaer, A. (1986). *Linguistik Umum*. Jakarta: PT Grafika.

Jurnal Ilmiah

Munaf, D. R. (2012). Pendayagunaan Abu Terbang pada Beton Kinerja Tinggi untuk Rumah Murah Pracetak. *Jurnal Sositoteknologi*, 12-17.

Artikel dalam buku

Rohaedi, A. (2004). Si Kabayan: Cawokah atau Jorang? dalam T. H. dkk, *Seks, Teks, dan Konteks: Tubuh dan Seksualitas dalam Wacana Lokal dan Global* (pp. 121-140).

Jatinangor: Jurusan Sastra Inggris, Fakultas Sastra, Universitas Padjadjaran dan Kelompok Belajar Nalar.

Website

Saidi, A. I. (2014, Juli 2). *warungnarasi.com*. diakses pada 15 November 2014, pukul 15.00 dari www.warungnarasi.com: <http://warungnarasi.com/nalar-memilih-presiden-dalam-perspektif-semiotika>